

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Hinterland di Kabupaten Rokan Hulu Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sawit

Ahmad Khusaini¹, Lutfia Bamatraf^{1*}, Belia Afifah¹

¹ Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik,
Politeknik Kampar, Bangkinang, Indonesia

*E-mail: lutfiabamatraf81@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu melalui pemanfaatan sumber daya alam, dengan fokus pada studi kasus perkebunan kelapa sawit dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan analisis kebijakan yang ada. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis SWOT peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu melalui sumber daya alam (industri kelapa sawit) adalah kekuatan dan kelemahan dari faktor internal sebesar 1,82 dan faktor eksternal sebesar 0,27. Dalam upaya ini perlu adanya implementasi kebijakan yang tepat antara semua pihak terkait sehingga membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan

Kata Kunci : *Hinterland; SWOT; Sawit.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of government in the development of the hinterland economy in Rokan Hulu Regency through the utilization of natural resources, focusing on a case study of oil palm plantations in accelerating regional economic growth. The method used in this study is a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with the development of the oil palm plantation sector in the district. This study uses a qualitative approach by collecting data through literature studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of existing policies. The data collected will be analyzed descriptively and interpreted to gain a deep understanding of the role of government in the development of the hinterland economy in Rokan Hulu Regency. From the results of the study using SWOT analysis of the role of government in developing the hinterland economy in Rokan Hulu Regency through natural resources (oil palm industry) are the strengths and weaknesses of internal factors of 1.82 and external factors of 0.27. In this effort, there needs to be implementation of appropriate policies between all related parties so as to help

achieve sustainable economic growth, create jobs, improve community welfare, and maintain environmental sustainability in Rokan Hulu Regency.

Keyword : *Hinterland; SWOT; Palm Oil.*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hulu, yang terletak di bagian tengah Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan jumlah penduduk mencapai 560.747 jiwa dan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 422.632 hektar pada tahun 2020 (P. K. R. Hulu, 2020), sektor ini menjadi tumpuan utama perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi hinterland, seperti di Rokan Hulu, menjadi upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan kontribusi daerah terhadap pembangunan regional dan nasional (Ananda et al., 2023).

Hinterland adalah daerah belakang suatu pelabuhan, di mana luasnya relatif dan tidak mengenal batas administratif suatu daerah, propinsi, atau batas suatu negara tergantung ada atau tidaknya pelabuhan yang berdekatan dengan daerah tersebut. Jaringan transportasi darat: jalan raya, kereta api, dan lalu lintas sungai memegang peranan penting pada suatu wilayah hinterland (Maulani et al., 2024). Kabupaten Rokan Hulu termasuk kedalam kategori wilayah yang memiliki hinterland, yaitu merupakan wilayah yang berada dibelakang atau pesisir yang mempunyai hubungan ekonomi, sosial, dan budaya. Daerah hinterland biasanya memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah pesisir maupun daerah lainnya.

Daerah hinterland di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kecamatan yang terletak di bagian tengah dan utara

kabupaten, contohnya Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Kabun. Pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu melalui pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kelapa sawit, menjadikan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah hinterland dengan cara mengoptimalkan kontribusi daerah hinterland dalam pembangunan kabupaten maupun nasional. Transportasi sawit di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan beberapa moda diantaranya truk, kapal sungai (tongkang), dan laut (pelabuhan Dumai). Truk digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) dari kebun ke pabrik pengolahan atau pabrik kelapa sawit (PKS).

Hinterland di wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam potensi adalah perkebunan kelapa sawit, dan karet. Kelapa sawit dan karet dapat dijadikan sebagai salah satu bahan baku yang bisa dijadikan komoditas ekspor seperti CPO minyak mentah, yang mendapatkan devisa bagi daerah itu sendiri. Selain sawit dan karet potensi sumber daya alam lainnya adalah disektor pertambangan dan pariwisata (Faisal et al., 2024).

Peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi hinterland dan memanfaatkan potensi sumber daya alam sawit secara efektif. Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan infrastruktur transportasi, mendukung teknologi dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mendorong diversifikasi produk turunan kelapa sawit dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten rokan Hulu tidak hanya pada pemanfaatan sumber daya alam nya saja, tetapi harus juga memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. LANDASAN TEORI

Wilayah hinterland dapat disebut juga sebagai kota satelit. Dari kedua kata diatas mempunyai makna yang sama, yaitu sebagai salah satu kota kecil yang letaknya berada disekitaran kota besar, dimana memiliki kesamaan satu dengan lainnya didalam pola kinerja diruang lingkup yang lebih kecil. Wilayah hinterland tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota (Febriyani et al., 2014).

Hinterland adalah daerah yang berada di belakang suatu pelabuhan, yang mana memiliki luas yang relatif dan tidak mengenal batas administratif suatu daerah, provinsi ataupun batas suatu negara yang mana terletak pada ada tidaknya pelabuhan yang berdekatan dengan daerah tersebut (Humang, 2018). Pertumbuhan sosial dan ekonomi dipengaruhi oleh pergerakan dari lajunya pertumbuhan pada sektor ekonomi seperti sektor yang mempunyai peranan yang paing dominan, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk disertai dengan mobilitasnya yang semakin meningkat, sehingga perkembangan jumlah penduduk tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hierarki dan fungsi kota-kota.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan manfaat atau spillover effect positif terhadap hinterland, sehingga gap yang ada tidak terlalu besar. Dengan menentukan pusat pertumbuhan dengan memfokuskan pertumbuhan terutama perekonomian pada daerah tersebut, akanvmenyebarkan efek yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Perkembangan wilayah pusat pertumbuhan akan

meningkatkan produksi daerah hinterland sehingga daerah hinterland juga akan mengalami perkembangan (Priyadi & Atmadji, 2017).

Transportasi yang digunakan dalam pengangkutan barang (sawit) dari pelabuhan ke daerah hinterland Kabupaten Rokan Hulu diantaranya menggunakan kapal tongkang, kapal barang, dan truk. Kapal tongkang digunakan untuk mengangkut produk kelapa sawit dan hasil hutan dari Pelabuhan Dumai ke Sungai Kampar. Selanjutnya, kapal barang digunakan untuk mengangkut produk-produk tersebut dari Sungai Kampar ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Kabupaten Rokan Hulu. Tidak hanya transportasi melalui jalur sungai saja yang akan digunakan dalam pengiriman barang tetapi juga menggunakan truk, truk digunakan untuk mengangkut produk-produk tersebut ke daerah-daerah yang lebih terpencil (Rohman et al., 2024) . Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan raya dan jembatan, untuk memudahkan pengangkutan barang dari pelabuhan ke daerah hinterland (Aprianti & Asmara, 2023).

Dalam kajian literatur sebelumnya, Priyadi & Atmadji (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan manfaat atau spillover effect positif terhadap hinterland, sehingga kesenjangan yang ada tidak terlalu besar. Dengan menentukan pusat pertumbuhan dan memfokuskan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, akan tercipta efek yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Perkembangan wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan produksi daerah hinterland sehingga daerah hinterland juga akan mengalami perkembangan.

Humang (2018) menambahkan bahwa jaringan transportasi yang baik menjadi faktor kunci dalam mengembangkan wilayah hinterland, karena dapat memperlancar distribusi barang dan jasa antara wilayah hinterland dengan pusat pertumbuhan. Sumahdumin

(2001) juga menekankan pentingnya penataan ruang wilayah dalam pengembangan wilayah hinterland, yang mencakup tujuan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu melalui pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi atau transportasi secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan berbagai aspek seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur transportasi, peran masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks pengembangan ekonomi hinterland.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu; (2) Bagaimana upaya pemanfaatan sumber daya alam, terutama industri kelapa sawit, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; (3) Apa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan industri sawit terhadap hinterland di Kabupaten Rokan Hulu; dan (4) Bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi hinterland melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu, mengevaluasi upaya pemanfaatan sumber daya alam khususnya industri kelapa sawit dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan industri sawit, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi hinterland melalui pemanfaatan sumber daya alam.

3. METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan analisis kebijakan yang ada. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Studi kasus dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan daerah yang menjadi daerah hinterland, seperti yang terlihat di peta administrasi Kabupaten Rokan Hulu.

Variabel yang digunakan yaitu: kondisi wilayah, jumlah penduduk, infrastruktur dalam pengembangan wilayah hinterland. Metode pengumpulan data menggunakan teknik survei lapangan, data sekunder, dan studi literatur seperti jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wilayah

Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah kependudukan sebesar 560.747 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 285.621 jiwa (50,94%) dan penduduk perempuan 274.126 jiwa (49,06%). Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Rokan Hulu menurut data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2021. Perda Kab. Rokan Hulu No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040, kondisi wilayah kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 7.588,13 km² dengan 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan di utara, Bengkalis dan Rokan Hilir di timur, Kampar di selatan, dan Pasaman

dan Pasaman Barat di barat. Di kabupaten ini terdapat beberapa sungai besar seperti Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri.

Pengembangan wilayah hinterland di kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan, keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Beberapa strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang diterapkan antara lain adalah (Sumahdumin, 2001):

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
- c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota

Lingkup kajian dan isi dari RTRW Kabupaten/Kota terdiri dari pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya; pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu; sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan per-kotaan; sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan; penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Pengembangan wilayah hinterland berdasarkan pada sumber daya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang notabane nya adalah perkebunan (sawit). Penataan tata ruang yang dikembangkan dilihat dari aspek jalur-jalur transportasi yang dilewati oleh pelaku usaha seperti melewati darat, dan sungai dengan berbagai armada yang digunakan, salah

satunya untuk jalur transportasi sungai pengangkutan hasil bumi (sawit) menggunakan tongkang dan kapal, sedangkan jalur darat menggunakan armada truk, pick up, dan juga fuso. Pengembangan wilayah hinterland juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengembangkan wilayah hinterland tersebut.

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu (P. R. Hulu, 2024) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 – 2040.

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut RTRWK Rokan Hulu adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- c. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- d. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- e. Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi: sistem jaringan

- jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
- f. Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Kepenuhan (Pasal 13)
 - g. Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kecamatan Ujung Batu.
 - h. Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), terdiri atas: ruas Rantau Berangin - Tandun; ruas Tandun - Pasir Pengaraian; dan ruas Pasir Pengaraian - Batas Sumut. jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3), terdiri atas: ruas Rokan - Pendalian - Dusun Batas; ruas Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbang; ruas Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut; ruas Dalu-dalu - Mahato; ruas Simpang Suram - Simpang Bagan 7 - Sontang; ruas Simpang Kumu - Kota Tengah; ruas Kota Tengah - Sontang; ruas Tapung - Tandun; ruas Sontang - Simpang Jurong - Duri; dan ruas Ujung Batu - Kota Lama - Simpang Bagan 7.
- 1) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4); jalan lokal primer; dan jalan strategis kabupaten.
 - 2) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi: alur pelayaran kelas III yang kewenangan Pemerintah Kabupaten; lintas penyeberangan dalam kabupaten; dan pelabuhan sungai, dan danau.

Strategi Pengembangan

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan wilayah dengan teknik analisis SWOT. Faktor internal dan eksternal wilayah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS)

S	Faktor Strategis	Nilai Signifikan	Bobot	Rating	Skor
	1. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan yang cocok untuk budidaya sawit.	4	0,18	4	0,73
	2. Kualitas produk atau layanan yang unggul.	4	0,18	4	0,73
	3. Keahlian lokal dan tenaga kerja terampil dalam budidaya dan pengolahan kelapa sawit.	4	0,18	4	0,73
	1. Dukungan pemerintah daerah, seperti kebijakan dan insentif yang mendukung industri sawit.	3	0,14	4	0,55
	2. Kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta di sektor sawit.	4	0,18	3	0,55
	3. Potensi pasar yang besar untuk produk kelapa sawit.	3	0,14	4	0,55
	Total	22	1,00		3,82

W	4. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada industri sawit, yang dapat mengekspos daerah tersebut terhadap fluktuasi harga pasar global.	2	0,18	2	0,35
	5. Tergantung pada perusahaan besar dalam industri sawit, yang dapat mengurangi kontrol pemerintah atas kebijakan dan praktek yang berkelanjutan.	2,5	0,22	2	0,4386
	6. Kurangnya diversifikasi ekonomi di sektor lain selain sawit, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko ekonomi.	2	0,18	2	0,3509
	7. Masalah Lingkungan dan Sosial: Industri kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan masalah lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan habitat, dan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.	2	0,18	2	0,35
	8. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Misalnya, akses ke pasar, fasilitas pengolahan yang terbatas, atau infrastruktur transportasi yang kurang efisien dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi hinterland.	2,9	0,25	2	0,51
Total		11,4	1,00		2,00

Tabel 2. Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS)

O	Faktor Strategis	Nilai	Bobot	Rating	Skor
		Signifikan			
	1. Permintaan yang terus meningkat untuk produk kelapa sawit baik di pasar domestik maupun internasional.	4	0,29	4	1,14
	2. Peluang untuk mengembangkan produk turunan kelapa sawit dengan nilai tambah, seperti biodiesel atau produk kosmetik.	3	0,21	2	0,43
	3. Potensi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit yang lebih	4	0,29	3	0,8571

	maju, seperti pabrik minyak kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit berbasis biomassa.				
	4. Peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan melalui inovasi teknologi dan praktik terbaik.	3	0,21	3	0,64
	Total	14	1,00		3,07
T	5. Fluktuasi harga kelapa sawit di pasar global, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan.	3	0,30	3	0,90
	6. Perubahan kebijakan nasional atau internasional terkait dengan industri kelapa sawit, seperti regulasi lingkungan atau kebijakan perdagangan.	2	0,20	3	0,6
	7. Masalah lingkungan terkait dengan deforestasi, kerusakan habitat, atau konflik lahan yang dapat mempengaruhi citra dan keberlanjutan industri sawit.	2	0,20	2	0,4
	8. Persaingan dari produsen kelapa sawit di daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.	3	0,30	3	0,90
	Total	10	1,00		2,80

Tabel 3. Strategi Pengembangan Wilayah Hinterland di Kabupaten Rokan Hulu

Internal	Strenghts	Strategi	Weaknesses	Strategi
	1. Potensi sumber daya alam yang melimpah	a. Meningkatkan jumlah produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi pada pengolahan industri sawit jika dilihat dari sumber daya alam yang ada, sehingga terbentuknya wilayah hinterlandnya. (1,2)	1. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada industri sawit, yang dapat mengekspos daerah tersebut terhadap fluktuasi harga pasar global.	a. Promosi pengembangan sektor lain selain sawit, seperti getah, kelapa, dan kakao, guna mengurangi ketergantungan pada satu hasil bumi. (1,3)
	2. Kualitas produk atau layanan yang unggul.		2. Tergantung pada perusahaan besar dalam industri sawit, yang dapat mengurangi kontrol	b. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan kelapa sawit, sehingga mengurangi

		b. Jalur transportasi yang semakin baik, mempermudah distribusi hasil panen, jika dilihat dari pekerja dalam melakukan pengolahan hasil bumi. (3,4)	pemerintah atas kebijakan dan praktek yang berkelanjutan.	ketergantungan pada perusahaan besar, dan infrastruktur yang masih jauh dari kata layak. (2,5)
	3. Keahlian lokal dan tenaga kerja terampil dalam budidaya dan pengolahan kelapa sawit.		3. Kurangnya diversifikasi ekonomi di sektor lain selain sawit, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko ekonomi.	c. Mengatasi masalah lingkungan dan sosial dengan menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya keberlanjutan industri sawit. (4)
	4. Dukungan pemerintah daerah, seperti kebijakan dan insentif yang mendukung industri sawit.	c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam meningkatkan akses pasar dan pengembangan produk. (5,6)	4. Masalah Lingkungan dan Sosial: Industri kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan masalah lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan habitat, dan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.	
	5. Kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta di sektor sawit.		5. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Misalnya, akses ke pasar, fasilitas pengolahan yang terbatas, atau infrastruktur transportasi yang kurang efisien dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi hinterland.	
	6. Potensi pasar yang besar untuk produk kelapa sawit.			
Eksternal	Opportunities		Threats	
	1. Permintaan yang terus meningkat untuk produk kelapa sawit baik di pasar domestik	a. Mengembangkan produk turunan kelapa sawit dengan nilai tambah,	1. Fluktuasi harga kelapa sawit di pasar global, yang dapat mempengaruhi	a. Melakukan diversifikasi pasar dengan menjalin hubungan

maupun internasional.	seperti biodiesel, produk kosmetik, atau produk makanan berbasis kelapa sawit, untuk menghadapi permintaan pasar yang terus meningkat. (2,1)	pendapatan dan keuntungan.	dengan berbagai negara tujuan ekspor untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan permintaan pasar. (1,3)
2. Peluang untuk mengembangkan produk turunan kelapa sawit dengan nilai tambah, seperti biodiesel atau produk kosmetik.		2. Perubahan kebijakan nasional atau internasional terkait dengan industri kelapa sawit, seperti regulasi lingkungan atau kebijakan perdagangan.	b. Mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan nasional atau internasional terkait industri kelapa sawit dengan tetap memprioritaskan praktik berkelanjutan. (2)
3. Potensi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit yang lebih maju, seperti pabrik minyak kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit berbasis biomassa.	b. Mendorong peningkatan kualitas dan peningkatan teknologi dalam industri sawit untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. (3)	3. Masalah lingkungan terkait dengan deforestasi, kerusakan habitat, atau konflik lahan yang dapat mempengaruhi citra dan keberlanjutan industri sawit.	c. Mengintensifkan inovasi teknologi dan penelitian dalam industri sawit untuk menghadapi persaingan dari produsen kelapa sawit di daerah lain. (4)
4. Peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan melalui inovasi teknologi dan praktik terbaik.	c. Mengoptimalkan potensi pasar yang besar baik di dalam negeri maupun internasional melalui upaya pemasaran yang efektif dan partisipasi dalam pameran atau perdagangan internasional. (1,4)	4. Persaingan dari produsen kelapa sawit di daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.	

Temuan ilmiah dari penelitian ini adalah identifikasi strategi pengembangan wilayah hinterland di Kabupaten Rokan Hulu yang spesifik, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit, pengembangan infrastruktur transportasi, diversifikasi ekonomi, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan.

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Hinterland

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil analisis, peran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

- Pembangunan Infrastruktur**
Pemerintah berperan dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi darat, sungai, dan laut untuk memfasilitasi

distribusi produk kelapa sawit. Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa antara wilayah hinterland dengan pusat ekonomi.

- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam budidaya dan pengolahan kelapa sawit.
- c. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040.
- d. Promosi Investasi Pemerintah berperan dalam mempromosikan investasi di sektor kelapa sawit dan sektor lainnya untuk mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah hinterland.
- e. Pengelolaan Lingkungan Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa pengembangan industri kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu melalui sumber daya alam (industri kelapa sawit) dilihat dari analisis SWOT yaitu kekuatan dan kelemahan dari faktor internal sebesar 1,82 dan faktor eksternal sebesar 0,27. Posisi ini berada pada Kuadran I (Expansion) yang menunjukkan bahwa strategi ofensif merupakan strategi yang

paling tepat untuk pengembangan ekonomi hinterland di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Gap yang ditemukan mengharuskan pemerintah setempat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah hinterland, dengan memperhatikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat setempat, pengawasan terhadap praktik industri, dan iklim investasi yang kondusif.
- c. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk petani sawit, melalui pelatihan, pendidikan, dan akses ke pembiayaan harus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan dan transportasi, juga diperlukan untuk memfasilitasi distribusi hasil panen dan meningkatkan akses ke pasar.
- d. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada pembangunan ekonomi hinterland melalui pemanfaatan sumber daya alam sawit. Implementasi kebijakan yang tepat dan sinergi antara semua pihak terkait akan membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A., Budianta, A., & Takwim, S. (2023). Studi Hinterland Dan Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Kota Palu Dan

- Kabupaten Donggala. *PeWeKaTadulako : Journal Of Urban And Regional Planning Of Tadulako*, Volume 2(2), 196–207. <https://doi.org/10.22487/peweka.v2i2.20>
- Aprianti, Y., & Asmara, N. P. (2023). Analisis Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Kota Samarinda. *Agri-Sosioekonomi*, 19(3), 1289–1300. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i3.45749>
- Faisal, A. M., Zuriyani, E., & Ulmi, A. Z. P. (2024). Analisis Spasial Konektivitas Wilayah Terhadap Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru. *El-Jughrafiyah*, 04(02), 204–214.
- Febriyani, R., Ribawanto, H., & Prasetyo, W. Y. (2014). Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 440–446.
- Hulu, P. K. R. (2020). Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019. 0761, 2023.
- Hulu, P. R. (2024). Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.
- Humang, W. P. (2018). Kinerja Jaringan Transportasi Jalan Akses dari Hinterland ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo. *Warta Penelitian Perhubungan*, 30(1), 35. <https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.402>
- Maulani, C. Z., Alifya, B., Junior, P., Manalu, S., & Mulyono, T. (2024). Implementasi Sarana dan Prasarana Sebagai Pendukung Hinterland Pelabuhan yang Berkelanjutan Implementasi Sarana dan Prasarana Sebagai Pendukung Hinterland Pelabuhan yang Berkelanjutan. May.
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ajie*, 2(2), 193–219. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art9>
- Rohman, R. K., Paramitha, P., Anggun, D., & Albani, M. R. (2024). Optimalisasi Hinterland Berserta Infrastruktur Pendukungnya Guna Mendukung Perkembangan Pelabuhan Yang Berkesinambungan. May, 0–8.